

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia atau masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Pembangunan yang optimal adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik dan berkesinambungan. Konsep ini menggeser paradigma pembangunan dari yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan yang berpusat pada manusia (Federova et al., 2024).

Menurut Sen dalam Pradana et al. (2024) serta Iswahyudi & Asnawi (2024), kebebasan dipandang sebagai tujuan fundamental sekaligus sarana utama dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Melalui teori kapabilitas, Sen menekankan bahwa pembangunan seharusnya diukur dari sejauh mana individu memiliki kemampuan dan kesempatan nyata untuk mencapai kehidupan yang mereka anggap bernilai penting. Dalam teori ini, kebijakan publik memiliki peran strategis, terutama melalui belanja pemerintah yang diarahkan pada peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar, karena kebijakan tersebut secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, faktor yang dapat mengukur kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah pendapatan.

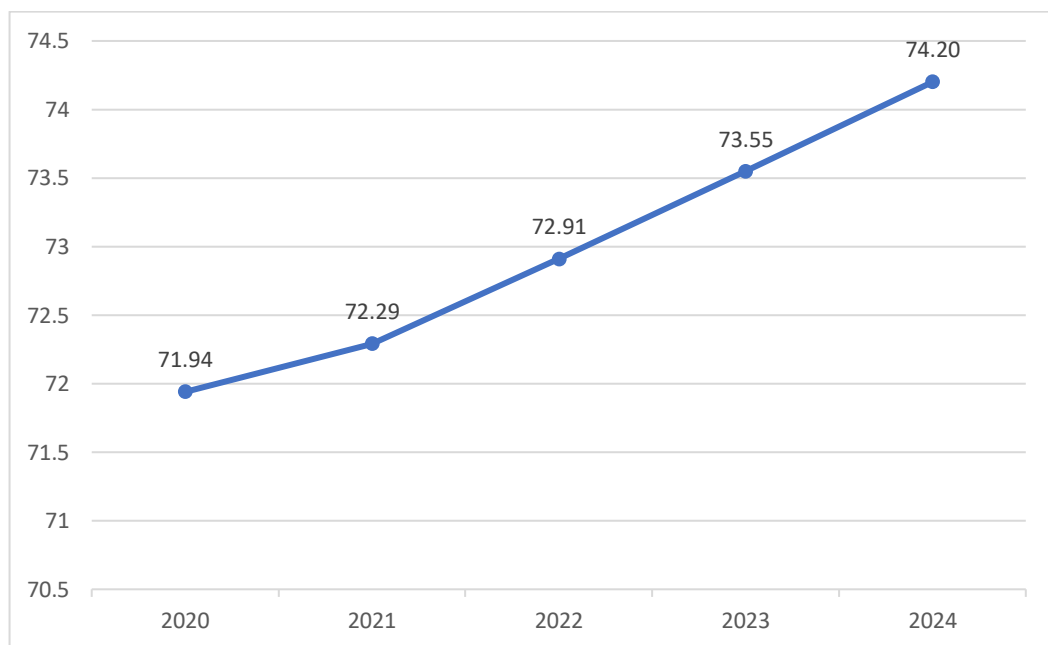
Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan individu untuk meningkatkan standar hidup dan memperluas pilihan-pilihan hidupnya. Namun demikian, Sen menegaskan bahwa kapabilitas individu tidak semata-mata diukur dari aspek pendapatan. Terdapat faktor lain yang digunakan untuk mengukur kapabilitas individu, yaitu kemiskinan. Kemiskinan dipahami sebagai bentuk keterbatasan kapabilitas, yaitu ketidakmampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan yang bernilai, seperti hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperluas kapabilitas masyarakat serta mengurangi kemiskinan yang membatasi kebebasan dan kualitas hidup individu.

Saat ini Indonesia berada di fase penting untuk memperkuat posisinya di tingkat regional maupun global dikarenakan Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi. Upaya peningkatan mutu pembangunan menjadi langkah yang strategis untuk pemerintah agar daya saing dan peran Indonesia di dunia semakin kuat. Untuk mewujudkan pembangunan yang optimal dan keberlanjutan, Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya besar secara jumlah tetapi unggul secara kualitas, yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Sembiring et al., 2024). Indikator ini memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi alat evaluasi

bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Gambar 1.1 menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Melalui grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai IPM di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar 71,94% dan pada tahun 2024 menjadi 74,20%.



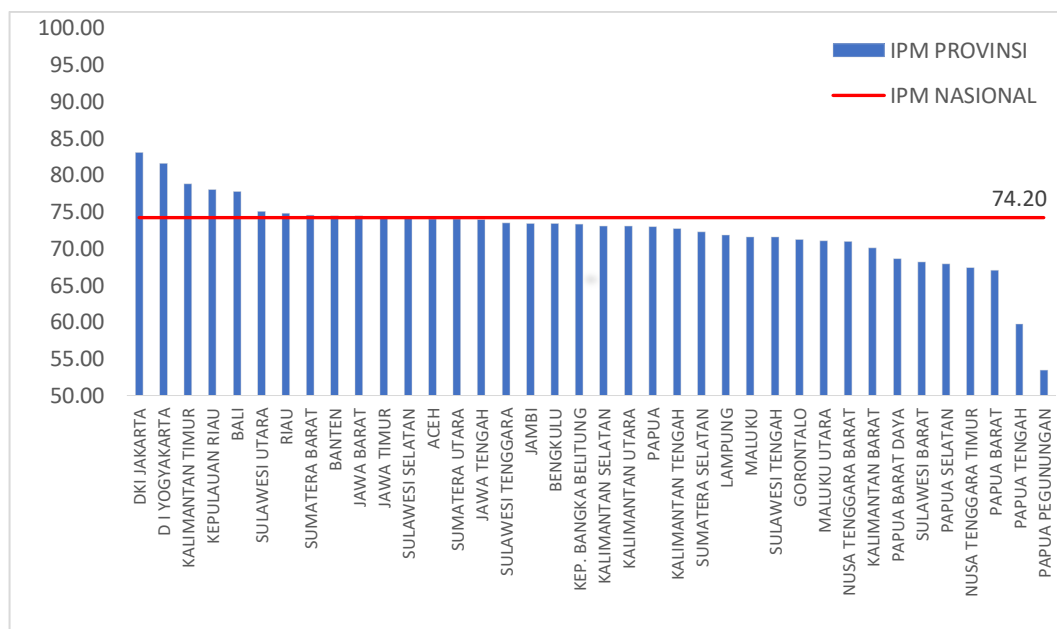
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Gambar 1.1 Perkembangan IPM Indonesia Tahun 2020-2024 (persen)

Gambar 1.1 tersebut menunjukkan IPM di Indonesia mengalami peningkatan pembangunan manusia selama periode 2020-2024. Peningkatan nilai IPM yang berlangsung juga telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan nilai IPM berstatus tinggi dengan angka $> 70\%$. Kenaikan bertahap ini menggambarkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas sumber daya manusianya, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar setiap tahun, tren yang

stabil menunjukkan arah pembangunan Indonesia yang relatif positif setelah melewati tekanan pandemi Covid-19.

Namun bilamana ditelusuri lebih mendalam, kondisi pembangunan manusia di Indonesia belum berjalan optimal dan masih ada ketimpangan antar wilayah, sehingga polarisasi capaian pembangunan manusia antar daerah di Indonesia menjadi suatu kondisi yang tidak dapat dihindari. Adapun capaian nilai IPM pada 38 Provinsi di Indonesia disajikan dalam grafik di bawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Gambar 1.2 Capaian IPM pada 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (persen)

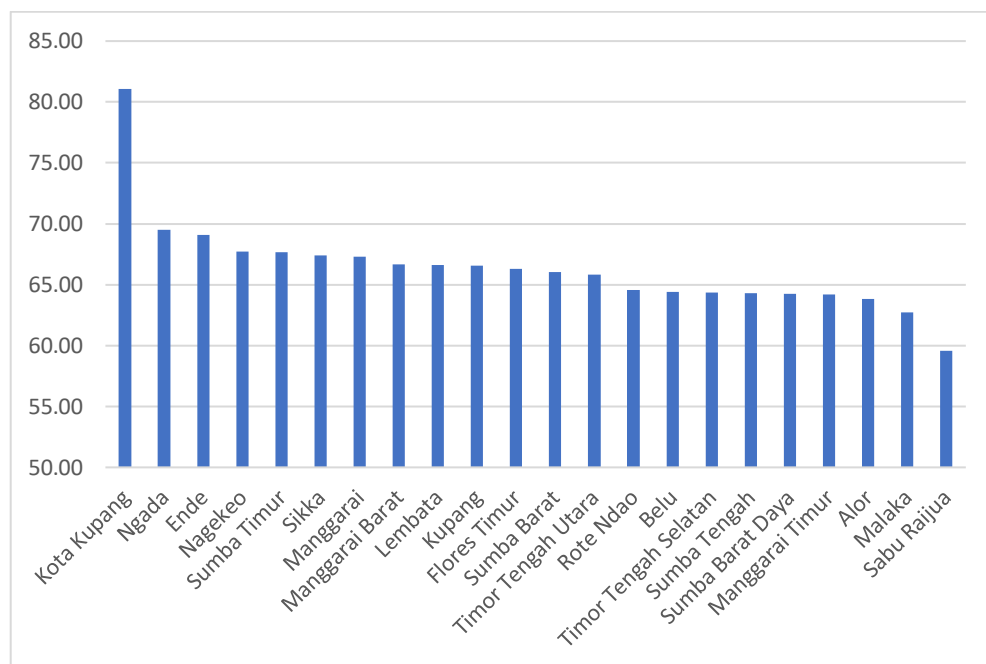
Berdasarkan Gambar 1.2 capaian IPM antarprovinsi di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup besar. Pada tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan IPM sebesar 83,08% dan masuk kategori sangat tinggi. Sebaliknya, masih terdapat beberapa provinsi dengan IPM di bawah rata-rata nasional, dengan capaian terendah berada di Papua Pegunungan 53,42% dan Papua Tengah 59,75% yang dipengaruhi oleh statusnya sebagai daerah pemekaran

baru pada tahun 2022. Selain itu, beberapa provinsi lain seperti Papua Barat 67,02%, Nusa Tenggara Timur 67,39%, Papua Selatan 67,90%, Sulawesi Barat 68,20% dan Papua Barat Daya 68,63% juga berada pada kategori rendah hingga sedang. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia masih relatif tinggi.

Salah satu provinsi yang termasuk dalam kelompok sepuluh daerah dengan nilai IPM terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada tahun 2024 mencatat capaian IPM sebesar 67,39%. Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki capaian IPM yang secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional dengan laju peningkatan yang relatif lambat, di mana selama periode 2020-2024 IPM Nusa Tenggara Timur hanya meningkat dari 65,19% menjadi 67,39%. Penelitian yang dilakukan oleh Balamakin & Osan (2025) salah satu faktor utama penyebab rendahnya dan lambatnya capaian IPM di Nusa Tenggara Timur ini adalah rendahnya pengeluaran per kapita yang hanya mencapai 8,534 juta rupiah, jauh di bawah sebagian besar provinsi lainnya. Situasi tersebut diperparah oleh tantangan struktural berupa keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, distribusi fasilitas publik yang tidak merata, serta karakteristik geografis kepulauan yang memperbesar kesenjangan antarwilayah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif tertinggal dibandingkan sebagian besar provinsi di kawasan timur Indonesia lainnya. Meskipun Provinsi Papua Barat memiliki capaian IPM yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah tersebut tidak dipilih sebagai objek penelitian karena keterbatasan ketersediaan dan

kelengkapan data pada tingkat Kabupaten/Kota selama periode pengamatan. Berbeda dengan itu, Nusa Tenggara Timur memiliki data IPM yang lebih lengkap dan berkesinambungan, sehingga menjadikannya relevan dan representatif untuk dikaji lebih lanjut dalam analisis pembangunan manusia di tingkat daerah.

Tren peningkatan IPM tingkat provinsi tersebut sesungguhnya merupakan hasil dari capaian IPM di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, analisis IPM perlu dilakukan hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambar berikut menyajikan capaian IPM di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Gambar 1.3 Capaian IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (persen)

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas capaian IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, terlihat adanya ketimpangan capaian

pembangunan manusia antarwilayah. Kota Kupang mencatat IPM tertinggi sebesar 81,08% dan telah masuk kategori tinggi, jauh melampaui seluruh kabupaten lainnya. Pada kelompok IPM sedang, sejumlah kabupaten seperti Ngada sebesar 69,52% dan Ende sebesar 69,11% berada di atas rata-rata provinsi. Sementara itu Sabu Raijua menempati posisi terendah dengan capaian IPM sebesar 59,58%. Secara umum, rata-rata capaian IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 berada pada kisaran 67%, yang mencerminkan bahwa pembangunan manusia di wilayah ini masih didominasi oleh kategori sedang, dengan kesenjangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan daerah kabupaten. Menurut Surbakti et al. (2025) daerah dengan nilai IPM yang tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan dibandingkan dengan capaian IPM nya relatif rendah.

Pola tersebut menunjukkan bahwa capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat dipengaruhi oleh kinerja pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota yang belum merata. Dominasi Kota Kupang sebagai pusat aktivitas wilayah kontras dengan kondisi sebagian besar kabupaten yang masih tertinggal, sehingga peningkatan IPM provinsi memerlukan perhatian yang lebih terfokus pada daerah-daerah dengan capaian IPM rendah agar pembangunan manusia dapat berlangsung lebih seimbang. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif agar peningkatan IPM dapat terjadi secara merata di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

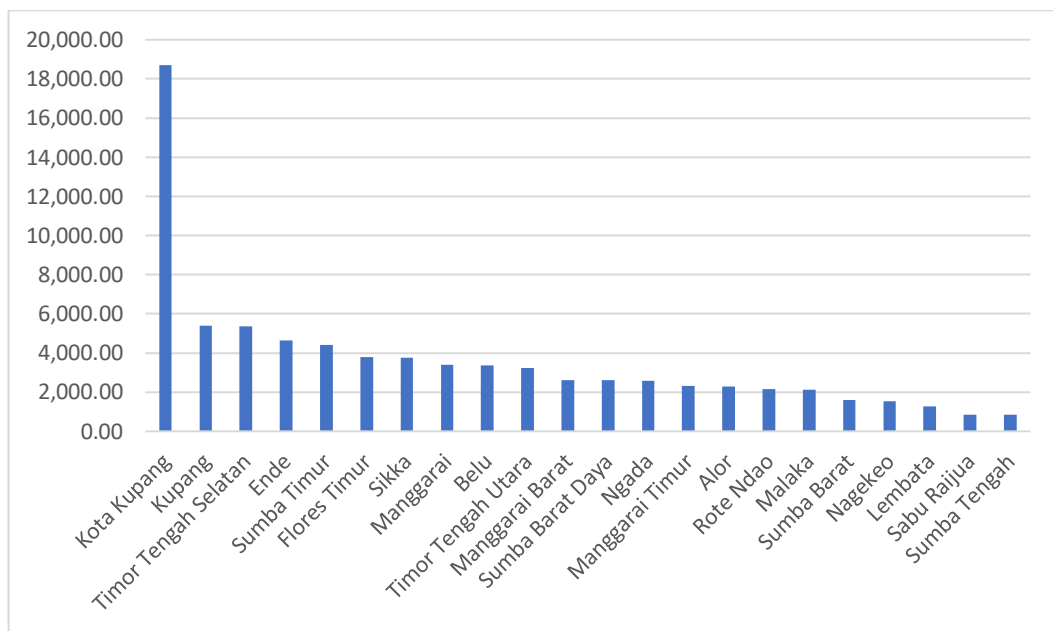
Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan memperluas akses sekolah, memperbaiki layanan

kesehatan dasar, kesempatan lapangan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi produktif yang meningkatkan pendapatan rumah tangga serta pembangunan infrastruktur yang terfokus di daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek pembangunan manusia tidak akan dapat bertahan lama (*sustainable*), karena peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional (Sahlan & Susanto, 2022).

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kondisi perekonomian daerah. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bias menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah (Farida et al., 2021).

Menurut Sen dalam Ahmad & Wasito (2023), pertumbuhan ekonomi yang dalam konteks ini tercermin melalui PDRB tidak dipandang sebagai tujuan akhir pembangunan, melainkan sebagai sarana untuk memperluas kapabilitas masyarakat. Peningkatan PDRB mencerminkan bertambahnya aktivitas produksi dan nilai tambah ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan nilai PDRB diharapkan mampu memperkuat dimensi ekonomi dalam IPM khususnya melalui peningkatan pendapatan masyarakat serta perluasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Analisis PDRB menjadi relevan sebagai dasar untuk melihat dinamika pembangunan manusia, sebagaimana ditunjukkan grafik nilai PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 di bawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Gambar 1.4 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (miliar rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.4 nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup nyata antarwilayah. Kota Kupang menjadi daerah dengan PDRB tertinggi mencapai Rp18.697,85 miliar, yang mencerminkan peran dominan wilayah perkotaan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, dan Ende juga menunjukkan nilai PDRB yang cukup tinggi namun, capaian nilai IPM nya masih relatif rendah. Perbedaan tingkat PDRB di antara Kabupaten/Kota ini tidak selalu sejalan dengan capaian IPM masing-masing wilayah. Terdapat wilayah dengan nilai PDRB tinggi namun IPM nya relatif

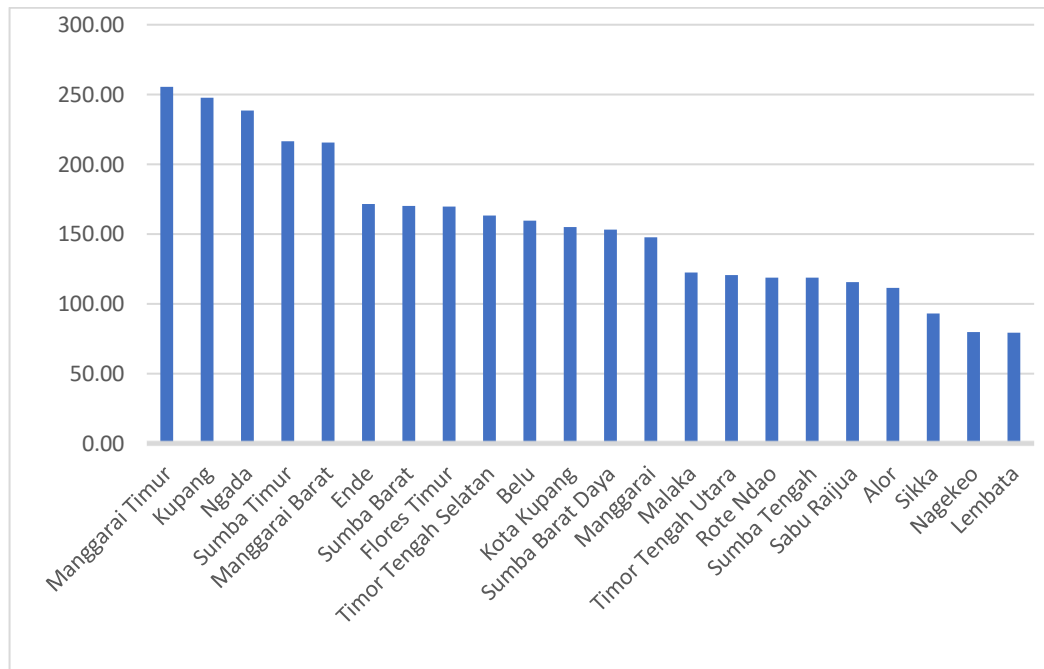
rendah, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata dalam bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat (Raihan, 2025).

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Murniati (2022) bahwa PDRB berpengaruh positif namun tidak signifikan yang artinya PDRB belum terlalu berpengaruh secara nyata dalam meningkatkan IPM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Nusrasi (2025) dimana PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, artinya semakin tinggi PDRB maka berpengaruh terhadap IPM.

Menurut Sen dalam Iswahyudi & Asnawi (2024), kebijakan publik memiliki peran strategis dalam memperluas kapabilitas masyarakat melalui penyediaan layanan dan fasilitas dasar. Salah satu kebijakan yang mendukung proses tersebut adalah desentralisasi fiskal, yakni pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam pengalokasian belanja daerah, salah satunya dalam bentuk belanja modal. Belanja modal menjadi instrumen penting dalam penyediaan sarana dan prasarana publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berperan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia serta memperluas akses terhadap layanan dasar, sehingga pembangunan manusia dapat berlangsung lebih optimal (Sari et al., 2021).

Oleh karena itu, analisis terhadap realisasi belanja modal diperlukan untuk melihat bagaimana pola pengeluaran pemerintah daerah selama periode penelitian serta mengetahui kecenderungan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Berikut disajikan grafik data mengenai realisasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Gambar 1.5 Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (miliar rupiah)

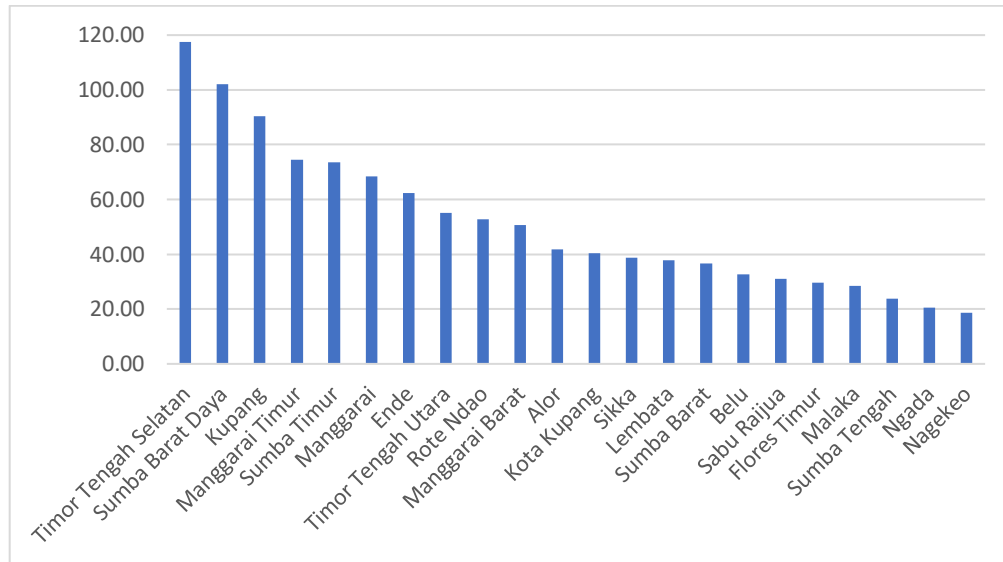
Berdasarkan informasi pada Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa belanja modal yang dianggarkan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup lebar antarwilayah. Kabupaten Manggarai Timur mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp255,62 miliar. Tingginya belanja modal pada daerah tersebut menunjukkan adanya fokus pemerintah daerah pada pembangunan infrastruktur dan sarana publik yang lebih besar di wilayah tersebut. Sebaliknya, realisasi belanja modal terendah terdapat di Kabupaten Lembata sebesar Rp79,27 miliar. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 berada di kisaran Rp150,00 miliar, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah

masih menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan fisik secara merata. Dengan demikian, data tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat belanja modal tidak serta-merta berdampak negatif terhadap IPM, dikarenakan capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara meningkat setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya lambat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Murdaningsih et al. (2024) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dimana dengan terpenuhinya fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astriani et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa pertimbangan empiris. Belanja modal pada dasarnya tidak selalu secara langsung meningkatkan kualitas pembangunan manusia, karena efektivitasnya sangat bergantung pada komposisi, kualitas perencanaan, serta ketepatan sasaran program. Dalam banyak kasus, alokasi belanja modal cenderung lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik yang bersifat jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap peningkatan IPM tidak segera terlihat dalam periode pengamatan yang relatif pendek.

Selain dari sisi perekonomian dan belanja pemerintah, perkembangan pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh kemiskinan (Handayani & Woyanti, 2021). Menurut Sen dalam Ahmad & Wasito (2023) serta Pradana et al. (2024) menyebut kemiskinan sebagai *unfreedom* karena kondisi miskin membelenggu seseorang sehingga ia tidak memiliki pilihan untuk mengakses pendidikan,

kesehatan, dan pekerjaan yang diinginkan. Berikut grafik data mengenai jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Gambar 1.6 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (ribu jiwa)

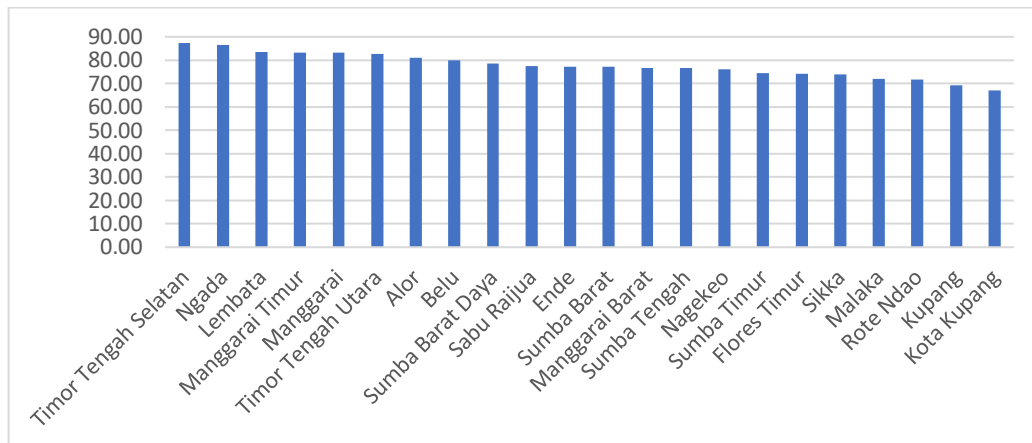
Gambar 1.6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di berbagai Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan signifikan antarwilayah. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Timor Tengah Selatan, yakni sebesar 117,41 ribu jiwa. Tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut mencerminkan besarnya beban sosial yang masih dihadapi, seiring dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Berbanding terbalik dengan daerah Timor Tengah Selatan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo jauh lebih rendah yaitu sebesar 18,68 ribu jiwa. Pola ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur tidak bersifat merata, melainkan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu, sehingga

mencerminkan perbedaan kondisi sosial ekonomi antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi tersebut.

Banyaknya jumlah penduduk miskin menjadi salah satu penghambat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, sebaliknya penurunan jumlah penduduk miskin dapat meningkatkan capaian keberhasilan pembangunan. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan meningkat ketika kemiskinan berkurang. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Lubis (2023) membuktikan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Maulana et al. (2022) dimana kemiskinan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Dari perspektif indikator capaian IPM melalui standar hidup yang layak, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu faktor penentu *output* perekonomian dan indikator kesejahteraan dalam penilaian IPM (Nastiti Wida & Nailufar, 2023). Menurut Sen dalam Ahmad & Wasito (2023), keterlibatan penduduk dalam pasar kerja dipandang sebagai sarana penting untuk memperluas kapabilitas individu dalam mencapai standar hidup yang layak. TPAK mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, perbedaan TPAK antarwilayah berpotensi memengaruhi capaian dimensi standar hidup layak dalam IPM. Berikut disajikan grafik TPAK di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Gambar 1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (persen)

Pada Gambar 1.7 menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 relatif tinggi, Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatatkan TPAK tertinggi, yaitu sebesar 87,41%, diikuti oleh Kabupaten Ngada sebesar 86,40% dan Kabupaten Lembata sebesar 83,53%, yang mengindikasikan tingginya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Sementara itu, Kota Kupang menunjukkan TPAK terendah sebesar 67,01%, yang mengindikasikan masih terbatasnya partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan, rata-rata TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 berada di kisaran 77%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di wilayah ini telah terlibat dalam pasar kerja atau setidaknya aktif mencari pekerjaan, meskipun kualitas pekerjaan yang tersedia belum tentu seluruhnya produktif dan berupah layak.

Artinya, TPAK ini dipandang memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnun Nisa & Maria Benedictus

(2022) yang menyatakan bahwa TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Retnowati & Zumaeroh (2023) menemukan bahwa TPAK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia. Kondisi tersebut kemungkinan dapat terjadi karena TPAK di beberapa provinsi di Indonesia belum sepenuhnya mampu terserap dengan baik oleh pasar tenaga kerja sehingga belum dapat meningkatkan standar hidup layak.

Berdasarkan data dan penelitian-penelitian sebelumnya, masih terdapat beberapa inkonsistensi antara satu penelitian dengan penelitian lainnya dimana terdapat hasil penelitian yang sesuai dengan teori, tetapi ada pula yang hasilnya bertentangan. Oleh karena itu, penulis menjadikan perbedaan dari hasil penelitian-penelitian tersebut sebagai celah penelitian (*research gap*). Celah penelitian dalam penelitian ini adalah empirical gap yang muncul karena masih terdapat ketidaksesuaian dari beberapa hasil penelitian.

Melihat beberapa indikator dan penjelasan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana diuraikan di atas serta adanya fenomena yang mendasari, maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis sejauh mana Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang masalah ini dengan judul **“Pengaruh PDRB, Belanja Modal, Kemiskinan dan TPAK terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB, belanja modal, kemiskinan dan TPAK secara parsial terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, belanja modal, kemiskinan dan TPAK secara bersama-sama terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB, belanja modal, kemiskinan dan TPAK secara parsial terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB, belanja modal, kemiskinan dan TPAK secara bersama-sama terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu dapat bermanfaat karena adanya hal baru dalam penelitian dengan menggunakan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebuah pendekatan yang selama ini belum banyak diteliti mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam merumuskan kebijakan fiskal dan program pembangunan yang lebih efektif untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan pengaruh dari PDRB, belanja modal, kemiskinan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti pembangunan manusia, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh faktor ekonomi, fiskal, sosial, dan ketenagakerjaan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini akan dilaksanakan terhitung dari bulan Oktober 2025.

Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

[illegible]